



KR-Franz Boedisukarnanto

**GARAP LAHAN:** Petani membersihkan rumput liar dan membalik tanah (dhangir-Jawa) yang pertama setelah tanaman jagung tumbuh pada lahan di Dusun Kembang, Madurejo, Prambanan, Sleman, Rabu (5/8). Pada musim kemarau para petani beralih dari tanam padi ke jagung.

## UNTUK BELANJA BERBAGAI SEKTOR Gerakkan Ekonomi Indonesia Butuh Rp 800 T

**JAKARTA (KR)** - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, agar ekonomi Indonesia terus bergerak, dibutuhkan dana Rp 800 triliun perkuartal, yang akan dibelanjakan di berbagai sektor termasuk untuk belanja Bantuan Sosial (Bansos) ataupun dana cash yang diberikan ke masyarakat.

"Ini untuk mendorong daya beli masyarakat sehingga pada Kuartal III-2020 bisa memperkecil gap atau jarak negatif yang terjadi dari Kuartal II-2020," kata Airlangga Hartarto pada konferensi pers tentang strategi pemulihan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jakarta secara virtual, Rabu (5/8).

Dikatakan Airlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2020 sebesar minus 5,32 persen, masih lebih bagus ketimbang beberapa negara lain seperti Amerika Serikat yang mencapai minus 9,5 persen, Prancis minus 19 persen, Singapura minus 12 persen, Meksiko minus 18,9 persen, sementara China sudah mengalami pertumbuhan positif namun pada Kuartal I-2020 China sudah lebih dulu negatif yakni sebesar minus 6,8 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada

Triwulan II-2020 ini tidak sedalam negara lain. Namun kita berharap ada efek recovery atau perbaikan ekonomi global terutama China, yang tentu akan menaikkan pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal selanjutnya," katanya.

Sementara untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020-2021, Menko Perekonomian mengatakan, untuk ekonomi global diperkirakan minus 7,6 hingga minus 4,9 persen serta diperkirakan perekonomian akan pulih pada tahun 2021 dengan kisaran 2,5 sampai 5,4 persen.

Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa lembaga dunia memperkirakan pertumbuhannya sekitar minus 3,9 persen, namun Pemerintah sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 0,5 hingga 1 persen.

Bahkan pada tahun 2021 mendatang, menurut Airlangga, hampir seluruh negara mengaku optimis pertumbuhan ekonomi akan positif. Begitu juga dengan Indonesia sangat optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah positif. Apalagi bila vaksin untuk pencegahan Covid-19 sudah ditemukan, akan membuat dunia merasa optimis akan perbaikan ekonomi. (Lmg)-d

## INVESTASI PERLU DITINGKATKAN

# Pertanian, Tumbuh Positif di Tengah Pandemi

**JAKARTA (KR)** - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai, Pemerintah perlu meningkatkan upaya mendorong investasi di sektor pertanian, mengingat sektor tersebut tetap tumbuh positif di tengah pandemi Covid-19.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis sektor pertanian berkontribusi sebesar 15,46 persen pada struktur pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Triwulan II-2020. Nilai kontribusi ini meningkat dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 13,57 persen.

"Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian cukup resilien selama masa krisis seperti pandemi Covid-19. Saat kinerja sektor lain terhambat akibat implementasi Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) dan berbagai pembatasan, sektor pertanian dan rantai pasoknya dikecualikan dari PSBB," kata Felippa di Jakarta, Rabu (5/8).

Selain itu, data BPS juga menunjukkan bahwa sektor ini merupakan satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan di antara lima sektor terbesar di Indonesia, yaitu industri (minus 6,19 persen), perdagangan (minus 7,57 persen), konstruksi (minus 5,39 persen) dan pertambangan (minus 2,72 persen).

Pertumbuhan positif ini merupakan capaian yang bagus di saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,3 persen di Triwulan II tahun ini. Sektor pertanian sendiri menunjukkan pertumbuhan 2,19 persen (yoy).

Felippa menyebutkan, ada beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian. Pertama, sektor pertanian memproduksi makanan sebagai kebutuhan primer sehingga permintaan cenderung tetap stabil. Untuk beberapa komoditas yang bukan makanan pokok seperti peternakan, ada penurunan sebesar 1,83 persen dibandingkan tahun 2019. Namun, untuk komoditas pertanian lainnya tetap meningkat.

Kedua, sektor pertanian juga cenderung lebih mudah beradaptasi dengan protokol kesehatan

dibandingkan dengan sektor lain. Kegiatan di sawah dan lingkungan terbuka dan kemampuan menjaga jarak saat bertani membuat risiko penularan Covid-19 di sektor pertanian secara umum lebih rendah dibanding sektor lainnya.

Selain itu, pandemi juga membuat banyak orang yang beralih ke sektor pertanian. Hal ini terbukti dari sub sektor jasa pertanian dan perburuan yang meningkat 2,36 persen (yoy) yang dirilis BPS. Sebagai contoh, warga Bali yang terpukul perekonomiannya karena tutupnya sektor pariwisata beralih ke pertanian.

Untuk itu, dibutuhkan peningkatan investasi ke sektor pertanian untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan sektor ini. (Ant)-f

## Penurunan Stunting Dipercepat

**JAKARTA (KR)** - Percepatan penurunan stunting yang sudah menjadi program pemerintah harus terus dipercepat. Menteri Kesehatan mendapat tantangan Presiden Joko Widodo agar pada tahun 2024 turun menjadi 14 persen.

"Data yang saya miliki ada perbaikan dalam prevalensi stunting dari 37% di 2013 menjadi 27,6% di 2019. Ini ada penurunan yang cukup lumayan, tetapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan kepada Menteri Kesehatan di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%," kata Presiden saat memimpin Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8).

Oleh sebab itu, Presiden minta fokus untuk menurunkan stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, di antaranya NTT (Nusa Tenggara Timur), Sulbar (Sulawesi Barat), NTB (Nusa Tenggara Barat), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

"Saya juga minta para Gubernur nanti Mendagri juga bisa menyampaikan kepada Gubernur, Bupati, Walikota sampai ke kepala desa, terutama untuk 10 provinsi tersebut supaya betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting," ujar Presiden. (Sim)-f

## PRESIDEN TERBITKAN INPRES

# Langgar Protokol Kesehatan Kena Sanksi

**JAKARTA (KR)** - Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, yang di dalamnya terdapat aturan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Sanksi sebagaimana dimaksud berupa: teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha," seperti dikutip dari salinan Inpres yang diperoleh di Jakarta, Rabu (5/8), dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara. Inpres tersebut diteken Presiden Jokowi pada 4 Agustus 2020.

Protokol kesehatan yang tidak boleh dilanggar yakni protokol perlindungan individu yang meliputi penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, membersihkan tangan secara teratur, pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kemudian protokol untuk perlindungan masyarakat meliputi sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19, penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses, penyediaan cairan pembersih tangan.

Upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas, upaya pengaturan jaga jarak, pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19, dan pengadaan fasilitas deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Kewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan itu dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau pe-

nanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Tempat dan fasilitas umum yang dimaksud adalah perkantoran, usaha dan industri, sekolah, tempat ibadah, stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara, transportasi umum, kendaraan pribadi, toko, pasar modern dan tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran, pedagang kaki lima, perhotelan, tempat wisata, dan fasilitas layanan kesehatan, area publik dan tempat umum.

"Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19," tulis Inpres itu.

Penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur, Bupati atau Walikota. Menurut Inpres tersebut, dalam penyusunan Peraturan Daerah itu, harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah. (Ant)-f

## FOKUS RAPAT TERBATAS PRESIDEN

# Pilkada Harus Semakin Berkualitas

**JAKARTA (KR)** - Penyelenggaraan Pilkada yang diselenggarakan di tengah situasi pandemi diharapkan tetap berjalan secara demokratis, langsung umum bebas dan rahasia (*luber*), jujur dan adil (*jurdil*), tapi paling penting tetap aman Covid-19. Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diluncurkan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8).

"Ada dua hal yang menjadi tekanan utama Pilkada 2020 ini, pertama harus semakin berkualitas dan juga aman Covid-19, sehingga aspek kesehatan. Kedua, aspek keselamatan petugas, peserta dan pemilih harus menjadi prioritas," jelas Presiden.

Presiden berharap, penyelenggaraan Pilkada serentak itu tetap menerapkan protokol kesehatan. Menurut Presiden,

harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan Pilkada, sehingga nantinya tidak menimbulkan kluster baru atau gelombang baru dari Covid-19 yang kontraproduktif.

Presiden juga menyebutkan, beberapa negara telah menyelenggarakan pemilu di masa pandemi ini, baik pemilu lokal maupun pemilu nasional seperti di Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan.

Namun, hal paling penting, ujar Kepala Negara, harus bisa meyakinkan pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Pemerintah sangat concern terhadap kesehatan serta keselamatan dari Covid-19. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, Presiden yakin, memberikan rasa aman dan yang diharapkan adalah tingkat partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik.

Presiden menyatakan telah mendapatkan laporan dari Menteri Dalam Negeri mengenai kesiapan anggaran. (Sim)-d

## DARI KALIANGKRIK MAGELANG

# Satu Keluarga Positif Covid-19

**MAGELANG (KR)** - Empat orang berasal dari satu keluarga di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19. Total pada Rabu (5/8), pasien positif di wilayah ini bertambah tujuh orang.

Empat di antaranya berjenis kelamin perempuan dan sisanya laki-laki. Empat perempuan itu, berasal dari Kecamatan Mertoyudan, Salaman dan dua dari Kaliangkrik. Semua tambahan positif ini, sebelumnya memiliki kontak erat dengan pasien positif.

"Berdasarkan hasil *tracing*, semua tambahan pasien positif hari ini, diketahui pernah memiliki riwayat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif sebelumnya. Empat di antaranya berasal dari Kecamatan Kaliangkrik yang berasal dari satu keluarga. Selain itu, dua dari Merto-

yudan dan satu dari Kecamatan Salaman," kata Koordinator Bidang Operasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Magelang Retno Indrastuti.

Ditambahkan Juru Bicara GTPP Covid-19 Kabupaten Magelang Nanda Cahyadi Pribadi, dengan tambahan tujuh positif ini, jumlah akumulasi pasien positif menjadi 184 orang. "Terdiri dari 15 dirawat dan sembilan menjalani isolasi mandiri, 154 sembuh dan enam meninggal," imbuhnya.

Sementara untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ada tambahan lima orang, dari Kecamatan Salaman, Windusari, Sawangan, Temuran dan Candimulyo. Meski demikian, ada dua PDP yang dinyatakan sembuh, dari Kecamatan Muntilan dan Kaliangkrik. Kini jumlah kumulatif PDP menjadi 368 orang. Terdiri 21 dirawat, 304 sembuh dan 43

meninggal.

Jumlah pasien positif Covid-19 di Kota Magelang bertambah dua orang, sehingga jumlah kumulatif tercatat 61 orang, terdiri 59 orang lama, dirawat 12 orang dan sembuh atau selesai isolasi 33 orang, serta meninggal dunia enam orang.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang dr Majid Rohmawanto mengatakan, dua pasien baru ini dari Kecamatan Magelang Utara, laki-laki 26 tahun dan perempuan 28 tahun.

Dikatakan, pada 29-30 Juli 2020 lalu dilakukan pemeriksaan swab terhadap puluhan orang, dan hasilnya ada dua orang yang positif. Ini merupakan pengembangan dari yang terjadi di wilayah Kecamatan Magelang Utara, beberapa waktu lalu. Rabu kemarin keduanya menjalani isolasi di RSUD Budi Rahayu Kota Magelang. (Bag/Tha)-f



KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

**MENEBAR BENIH IKAN:** Pasangan pengantin menebar benih ikan di Kali Glogok, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (5/8). Tradisi pengantin menebar benih ikan tersebut dilakukan untuk kelestarian alam terutama terhadap lingkungan sungai.